

BAB V

PERBEDAAN DAN KONFLIK ANTARA DI/TII S.M. KARTOSUWIRYO DENGAN DARUSSALAM K.H YUSUF TAUJIRI TAHUN 1948-1962

Konflik antara Darul Islam dengan Darussalam, jika dipandang dari arti kata konflik itu sendiri, yaitu suatu proses sosial dengan pola perilaku individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan (Soekanto, 2002: 99).

Berdasarkan arti konflik di atas, penulis memandang konflik Darul Islam dengan Darussalam, muncul oleh karena adanya kesadaran dari kedua kelompok tersebut, bahwa terdapat perbedaan baik dari pola perilaku, kepentingan atau nilai dan sebagainya. Oleh karena itu pada bab ini, penulis mencoba memaparkan dan menganalisa perbedaan di antara Darul Islam pimpinan S.M. Kartosuwiryo dengan Darussalam pimpinan K.H Yusuf Taujiri.

Perbedaan-perbedaan tersebut mengenai pandangan dan sikap politik di antara pimpinan kedua kelompok tersebut, khususnya mengenai dua isu pokok penting yaitu 1). Perspektif dan keinginan dari kedua tokoh mengenai pendirian Negara Islam, serta 2). Sikap politik dari kedua tokoh mengenai hasil Persetujuan Renville antara Republik Indonesia dengan Belanda.

Berdasarkan dari pandangan di atas, maka penulis membagi bab ini menjadi dua bagian besar. *Pertama*, penulis mencoba untuk memaparkan perbedaan dan pandangan politik antara kedua tokoh pimpinan kelompok Darul Islam dan Darussalam. Sementara, pada bagian *kedua*, penulis mencoba memaparkan gambaran jalannya peristiwa konflik fisik antara kedua kelompok tersebut.

Pada bagian *pertama*, penulis membaginya dalam beberapa sub-bagian lagi, yaitu: 1) Biografi dan pandangan politik S.M. Kartusuwiryo, 2) Biografi dan pandangan politik K.H Yusuf Tadjiri, dan 3). Perbedaan pandangan politik antara S.M. Kartusuwiryo dan K.H Yusuf Tadjiri. Pada bagian ini penulis mengkaji biografi (riwayat hidup) dari kedua tokoh tersebut. Karena menurut penulis sangat penting, hal ini didasari bahwa seorang tokoh sejarah menjadi tokoh bukan hanya karena dirinya saja, melainkan ada hal lain seperti tuntutan situasional dan kekuatan historis.

Anthony Reid dan Jamie Mackie, mengemukakan pentingnya kajian-kajian biografis, dalam Ahmad Suhelmi (2002: XV) bahwa: *The biographical or person centred approach to the depiction of Indonesian society is frequently a great deal more illuminating than are merely abstract categories of social science*, artinya kajian biografi atau tokoh yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang mempelajari persoalan makro masyarakat dan kebudayaan Indonesia, itu lebih menarik daripada kajian biografi yang hanya mengkaji mentalitas pribadi dari tokoh-tokoh sejarahnya. Maksud dari kajian biografi ini merupakan suatu upaya penulis untuk bisa memahami realitas masa lalu yang telah banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku dari kedua tokoh kelompok yang terlibat konflik.

5.1 Biografi dan Pandangan Politik

5.1.1 Biografi dan pandangan politik S.M.Kartosuwiryo

Kartosuwiryo yang mempunyai nama lengkap Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, lahir pada tanggal 7 Januari 1907 di Cepu, sebuah kota kecil di dekat perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Ayahnya, yang bernama Marijan Kartosuwiryo, bekerja sebagai mantri pada kantor yang mengkoordinasikan penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada masa itu mantri candu sederajat dengan jabatan Sekertaris Distrik. Dalam posisi inilah, ayah Kartosuwiryo mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu, yang tentunya menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya.

Latar belakang pendidikan Kartosuwiryo, di antaranya dalam usia enam tahun ia pernah masuk sekolah rakyat sampai kelas IV, lalu pindah ke HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) pada tahun 1915. Ketika orang tuanya pindah ke Bojonegoro pada tahun 1919, mereka memasukkan Kartosuwiryo ke ELS (*Europeesche Legere School*). Setelah lulus dari ELS pada tahun 1923, Kartosuwiryo mulai kuliah pada sekolah kedokteran di Surabaya yaitu NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*). Di sekolah tersebut dia mengikuti tingkat persiapan (*Voorbereidende School*) selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1926 dia memulai kuliah utama yang sebenarnya, tetapi setahun kemudian dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Dikeluarkannya Kartosuwiryo dari NIAS ini dikarenakan dia menyimpan buku-buku Marxis-komunis, yang pada tahun antara 1926-1927 pemerintah Belanda sedang gencar-gencarnya memburu orang-orang

komunis yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI. Maka sangat beralasan pihak NIAS menghukum Kartosuwiryo dengan mengeluarkannya dari sekolah tersebut.

Ideologi Marxis-Komunis yang dipelajari oleh Kartosuwiryo melalui buku-buku pemberian dari sang paman yang bernama Marko Kartodikromo, tokoh komunis (PKI) se-angkatan Alimin, Tan Malaka, Semaun dan Darsono, membuka kemungkinan “radikalisme” Kartosuwiryo dan semangat anti kolonialisme-imprialisme di masa remajanya produk interaksi intelektualnya dengan pemikiran-pemikiran Marxis (Suhelmi, 2002: 13-14).

Aktivitas Kartosuwiryo dalam kancah perpolitikan, dimulai dengan keikutsertaan dia dalam gerakan pemuda *Jong Java* di Surabaya pada tahun 1923. Pada tahun 1925, Kartosuwiryo pindah ke *Jong Islamieten Bond* (JIB), dan tidak lama kemudian menjadi ketua cabang JIB di Surabaya. Melalui keanggotaan di organisasi-organisasi pemuda *Jong Java* dan JIB, Kartosuwiryo berkenalan dengan tokoh Agus Salim dan Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin PSI (Partai Serikat Islam), yang pandangan politiknya, terutama cita-citanya akan suatu Negara Islam, di kemudian hari sangat mempengaruhi jalan pikiran Kartosuwiryo.

Pada bulan September tahun 1927 Kartosuwiryo menjadi sekertaris pribadi Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Pada tahun yang sama Tjokroaminoto bersama Kartosuwiryo pindah ke Cimahi Bandung, di rumah Tjokroaminoto di Cimahi Kartosuwiryo untuk pertama kalinya bertemu dengan Soekarno, yang pada saat itu telah menjadi ketua PNI (Perserikatan Nasional Indonesia). Pada bulan Desember 1927 di Pekalongan diadakan kongres PSII (Partai Serikat Islam

Indonesia), dan pada kesempatan tersebut Kartosuwiryo terpilih menjadi sekretaris umum PSII.

Di samping tugasnya sebagai sekretaris umum PSII di Batavia, Kartosuwiryo mulai bekerja sebagai wartawan pada redaksi koran harian partai tersebut yaitu *Fadjar Asia*. Dalam redaksi harian ini, dengan hanya waktu 16 bulan, yang pada awalnya bekerja sebagai korektor, reporter dan redaktur, akhirnya menjadi wakil pimpinan redaksi dan kuasa usaha. Dalam fase kehidupan jurnalistik inilah Kartosuwiryo mengembangkan kemampuan artikulasi gagasan-gagasannya.

Gagasan-gagasan radikal Kartosuwiryo mulai tampak dalam artikel-artikel *Fadjar Asia*. Ia menentang para bangsawan Jawa (kaum Priyayi) yang bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Pembelaannya terhadap kaum tertindas, petani kecil dan buruh-buruh juga dikemukakan. Dalam tulisannya yang lain ia mengatakan kemerdekaan Indonesia hanya bisa diperoleh dengan pengorbanan: “sebab kemerdekaan Tanah Air itu tidaklah sedikit harganya yang oleh karenanya harganya, tentu bakal memakan korban luar biasa” (Suhelmi, 2001: 17-18).

Selama tahun 1928, ketika Kartosuwiryo menjabat sebagai sekretaris Partai dan reporter *Fadjar Asia*, dia melakukan banyak perjalanan ke provinsi, untuk mengunjungi cabang-cabang PSII, salah satunya cabang Malangbong yang diketuai oleh Ajengan Ardiwisastra. Di Malangbong inilah, dimana Kartosuwiryo berkenalan dengan Siti Dewi Kalsum (Wiwiek), putri Ajengan Ardiwisastra yang kelak menjadi isterinya.

Ketika kongres Partai PSII pada akhir tahun 1929 di Batavia, Kartosuwiryo terpilih menjadi Komisaris Partai tersebut, untuk daerah Jawa Barat dan tetap menduduki posisi ini sampai pada kongres partai yang berikutnya yaitu pada akhir tahun 1931 di Surabaya. Sebagai komisaris partai PSII di Jawa Barat, Kartosuwiryo menggunakan kesempatannya ini untuk menjalin hubungan pribadi dengan para ulama setempat, bukan hanya di sekitar Malangbong, tetapi juga di daerah-daerah lain di Priangan Timur. Di bawah bimbingan mertuanya Ardiwisastra dan para ulamanya yang lain, Kartosuwiryo juga memperdalam pengetahuannya tentang agama Islam.

Pada tahun 1934 Tjokroaminoto meninggal dunia, hal ini membuat peran politik Sarekat Islam semakin menurun, ditambah dengan munculnya golongan nasionalis sekuler (PNI Soekarno), yang kemunculannya menantang kedudukan Sarekat Islam ataupun kepemimpinan Islam, umumnya dalam rangka pergerakan perjuangan kemerdekaan (Noer, 1996: 154). Kemerostan gerakan politik dari PSII ini diakibatkan pula adanya konflik internal antara kubu kooperatif versus non-kooperatif, dan sebelumnya SI dilanda konflik antara 'SI Merah versus SI Putih'. Dalam pergolakan di tubuh SI itu, Kartsosuwiryo bersama Abikoeso berpihak ke kubu "SI Putih" dan kubu non-kooperatif.

Pada dekade 1930-an ini Kartosuwiryo memainkan peran politiknya yang strategis dalam Sarekat Islam. Dalam tulisannya Ahmad Suhelmi (2001: 18) dijelaskan bahwa Kartosuwiryo seakan menjadi 'pemimpin politik bayangan' yang menggantikan Tjokroaminoto. Peran sentral tampak dari permintaan

organisasi agar Kartosuwiryo menulis Brosur Sikap Hijrah PSII yang dapat dijadikan landasan ideologis perjuangan PSII.

Pada kongres partai PSII yang ke 23 tahun 1937 di Bandung, di bawah pimpinan Kartosuwiryo dibentuk suatu komisi yang harus menyusun suatu program aksi Hijrah (Daftar Usaha Hijrah PSII), namun aksi ini tidak terwujud melalui partai seperti yang direncanakan semula, karena dalam beberapa tahun kemudian situasi dan dalam partai PSII mengalami perubahan haluan politik. Hal ini dijelaskan lebih lanjut, sebagaimana ditulis oleh Al Chaedar (1999: 47) bahwa:

Pada tahun 1939 Kartosuwiryo terlibat dalam pertengkaran sengit dengan mayoritas pimpinan PSII yang diketuai Abikusno. Sebagai pimpinan partai Abikusno mengajak Kartosuwiryo untuk memutar haluan politik partai dengan bergabung ke GAPI (Gabungan Politik Islam) dalam mengatasi tekanan pemerintah kolonial yang makin mendesak. Tetapi Kartosuwiryo tidak ikut melaksanakan perubahan arah balik politik ini dan tanpa kompromi tetap *istiqomah* pada pendiriannya, dimana satu-satunya haluan yang benar adalah politik Hijrah. Menurut Kartosuwiryo tuntutan GAPI, adalah pembentukan suatu parlemen Indonesia dan itu merupakan “sikap kooperasi juga namun dengan corak yang lain”

Sebagai tandingan dari apa yang telah diputuskan oleh Abikusno, yaitu untuk bergabung dengan GAPI untuk membentuk suatu parlemen Indonesia, maka Kartosuwiryo dan kawan-kawan, yang salah satunya yaitu Yusuf Taujiri membentuk partai baru yaitu Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK PSII). Dengan terbentuknya KPK PSII ini, selanjutnya Kartosuwiryo dan kawan-kawan mencoba merealisasikan politik Hijrah yang telah disusun oleh Kartosuwiryo, yang salah satu bentuknya menarik diri dalam kancah perpolitikan nasional, kemudian membentuk lembaga pendidikan Kader “Suffah” dalam gaya sebuah

Pesantren Tradisional yang berlokasi di Malangbong Garut. Kartosuwiryo kini menjadi “Tokoh Regional” saja, karena sikap Hijrahnya yang benar-benar konsekuen. Dalam masa pendudukan Jepang dia tetap mengfungsikan lembaga Suffah, namun kali ini lebih banyak memberikan pendidikan kemiliteran, yang sebelumnya lembaga Suffah ini tempat diberikannya pengajaran pengetahuan umum, pendidikan agama Islam dan ilmu politik.

Pada tahun 1943 Kartosuwiryo kembali aktif di bidang politik. Dia masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (Majelis Islam'Alaa Indonesia) di bawah pimpinan Wondoamiseno. Namun organisasi ini hanya berjalan selama enam bulan, karena pada bulan Oktober 1943 dibubarkan, yang selanjutnya mengadakan fusi ke Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada tanggal 11 Nopember 1943 dan Kartosuwiryo sendiri masuk menjadi anggota organisasi baru ini.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat, momen ini oleh Kartosuwiryo digunakan untuk mensosialisasikan tentang konsep Indonesia merdeka secara Islam di kalangan nasionalis Islam di tengah-tengah kekosongan politik dan kekuasaan. Sebelum hari-hari menjelang Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Kartosuwiryo telah menebar aroma deklarasi kemerdekaan Islam. Kartosuwiryo datang ke Jakarta bersama dengan beberapa elit pergerakan atau kaum nasionalis untuk memperbincangkan peluang yang mesti diambil guna mengakhiri dan sekaligus mengubah sejarah rakyat Indonesia.

Selanjutnya pada masa Revolusi kemerdekaan, Kartosuwiryo tidak bersikap antagonistik terhadap RI. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Hasan

Muarif Ambary (2003: 163) bahwa sampai tahun 1948-1949, Kartosuwiryo masih menampakkan pengakuannya terhadap RI sebagai negara dan pemerintahannya sendiri dan melihat dirinya sebagai warga negara. Tapi kekecewaan demi kekecewaan yang dialami Kartosuwiryo dan pengikut-pengikutnya menyangkut berbagai sektor sosial, ekonomi, politik, militer, agama dan psikologis mengubah keadaan itu.

Awal kekecewaan Kartosuwiryo adalah ketika ‘tujuh kata’ dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” dicoret oleh Hatta tidak lama setelah teks proklamasi dibacakan. Peristiwa pencoretan itu merupakan pukulan telak bagi ummat Islam yang sejak zaman penjajahan Belanda mendambakan diberlakukannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Kartosuwiryo pencoretan itu merupakan awal kekalahan politik Islam berhadapan dengan golongan nasionalis sekuler RI (Suhelmi, 2001: 19- 20).

Kekecewaan lain menyusul, pasca Persetujuan Renville, semua kekuatan gerilya TNI yang berada di kantong-kantong pertahanan Jawa Barat, seperti yang disebutkan dalam buku Sejarah Kodam Siliwangi IV (1968: 507) bahwa, kira-kira 35000 “maung” Siliwangi meninggalkan medan perjuangan Jawa Barat untuk Hijrah ke Jawa Tengah. Bagi para pejuang DI hal itu mengecewakan tidak hanya karena menunjukkan sikap kompromistis RI dan TNI kepada pihak Belanda, tapi juga membiarkan rakyat Jawa Barat tidak terproteksi. Hijrah TNI ini dianggap ‘pengkhianatan’ yang kemudian membangkitkan amarah rakyat Jawa Barat.

Apalagi yang mengungsi itu adalah Divisi Siliwangi, tentara kebanggaan rakyat Jawa Barat. (Suhelmi, 2001: 20).

Segera setelah Persetujuan Renville, sikap politik yang diambil oleh Kartosuwiryo adalah pasukan-pasukan Islam harus tetap berada di Jawa Barat untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda, dengan kata lain menolak untuk Hijrah. Bersama dengan pasukannya yang terdiri Hizbullah dan Sabilillah sebanyak 4000 orang diputuskan untuk tetap tinggal di Jawa Barat (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 266).

Sikap politik lain yang diambil Kartosuwiryo adalah pada tanggal 10-11 Februari 1948, diadakan sebuah Konferensi yang dihadiri 160 wakil-wakil organisasi Islam di Pangwedusan Distrik Cisayong. Di antara mereka hadir Kamran sebagai Komandan Teritorial Sabilillah, Sanusi Partawidjaja sebagai ketua Masyumi Daerah Priangan, Raden Oni sebagai pimpinan Sabilillah Daerah Priangan dan banyak lagi. Dalam Konferensi ini Kamran menuntut supaya tuntutan supaya pemerintah RI membatalkan persetujuan Renville, dalam Al Chaedar (1999: 72) isi tuntutan tersebut disebutkan bahwa:

Kalau pemerintah RI tidak sanggup membatalkan Renville, lebih baik pemerintah kita ini kita bubarkan dan membentuk lagi pemerintahan baru dengan corak baru. Di Eropa dua aliran sedang berjuang dan besar kemungkinan akan terjadi perang dunia III, yakni aliran Rusia lawan Amerika. Kalau kita di sini mengikuti Rusia, kita akan digempur Amerika begitu juga sebaliknya. Dari situ, kita harus mendirikan negara baru, yakni Negara Islam. Timbulnya Negara Islam ini, yang akan menyelamatkan negara.

Keputusan terpenting yang diambil dalam konferensi di Cisayong adalah membekukan Masyumi di Jawa Barat dan semua cabangnya, dan membentuk

pemerintah daerah di Jawa Barat harus oleh seluruh umat Islam tersebut, serta mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII). Pada konferensi ini juga dibentuk pula Majelis Islam yang dipimpin langsung oleh Kartosuwiryo sendiri, lalu dibentuk BKN (Badan Keamanan Negara), Baris (Barisan Rakyat Indonesia) dan PADI (Pahlawan Darul Islam).

Pada tanggal 1 Mei 1948 diselenggarakan konferensi Cijoho yang antara lain memutuskan: membentuk Dewan Imamah yang diketuai oleh Imam S.M.Kartosuwiryo, membentuk Dewan Fatuz (Dewan Pertimbangan Agung), serta mempersiapkan Qanun Azazi (UUD) yang intinya menyatakan bahwa "Negara Islam Indonesia" berbentuk Republik, yang diketuai oleh seorang Imam dengan Qur'an dan Hadis sahih sebagai hukum yang tertinggi. Qanun Azazi termaksud telah selesai dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1948.

Setelah persiapan-persiapan termaksud di atas, dengan memanfaatkan situasi dan kondisi politis dan militer di wilayah Jawa Barat pasca Persetujuan Renville, maka pada tanggal 7 Agustus 1949 pergerakan DI/TII S.M.Kartosuwiryo memperklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Pendirian Negara Islam Indonesia ini memiliki dasar ideologi atau perspektif yang cukup kuat dari Kartosuwiryo, sebagaimana ditulis oleh Ahmad Suhemi (2001: 24-25) bahwa:

Dalam perspektif Kartosuwiryo Islam memiliki konsepsi Negara yang jelas. Islam adalah agama dan Negara (*ad-dien wa ad-daulah*). Gagasan Negara Islam bukanlah *wisful thinking*, tapi sebuah kenyataan historis. Bukan sekedar teori politik normatif (*normative political theory*), tapi teori politik empiris (*empirical political theory*). 'Negara Madinah' zaman Nabi Muhammad SAW membuktikan hal itu. 'Negara Islam' memang 'alat' belaka, tapi yang sangat diperlukan demi terealisasinya syariat-syariat Islam. Di luar Negara Islam yang

ada hanyalah Negara *thagut*, sebuah pemaknaan simbolik Al-Qur`an bagi Negara yang tidak didasarkan Islam.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan pemikiran tersebut Kartosuwiryo memperoklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Cisampak daerah Cisayong Jawa Barat Sebagai tandingan atas Negara Republik Indonesia “*negara thagut*” negara kufur.

5.1.2 Biografi dan Pandangan Politik Yusuf Taujiri

K.H Yusuf Taujiri di lahirkan di Garut pada tahun 1901. Orangtua dari Yusuf Taujiri adalah K.H Harmain dan Hj Mutiah, dan beliau mempunyai lima saudara yaitu 2 kakak; Abdul Qudus, Onah dan 3 adik; Rumnasih, Eje dan Siti Quraesin.

Panggilan Yusuf Taujiri waktu masa kecil, sering disebut Damiri. Damiri ini terkenal merupakan anak yang nakal. Ketika Damiri oleh orangtuanya di kirim untuk sekolah di Pesantren ke Jawa Timur, Damiri ini hanya bertahan 4 bulan, dengan alasan tidak betah. Selanjutnya Damiri berpindah-pindah sekolah pesantren, di antaranya Pesantren Cipari (Wanaraja), Haur Koneng (Leles), Cikalama (Cicalengka), Nyublak (Cirebon), Gunung Puyuh (Sukabumi) dan sebuah Pesantren di Tasikmalaya. Untuk latar belakang pendidikan formal, Damiri pernah menimba ilmu di Sekolah Rakyat (SR) selama 3 tahun (Sobari, 2003 dan Garoet Pos, 2006: 25).

K.H Yusuf Taujiri selama hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertamanya, yaitu dengan Marfuah pada tahun 1936, kemudian dikaruniai anak sebanyak 8 orang yaitu Saep Darmawan, Saepah, Fatimah, Rizal,

Cholid, Siti Qomariah, Khadijah dan yang terakhir Amar Mujahid. Untuk pernikahan yang kedua, yaitu dengan Halimah, hanya dikaruniai satu anak yaitu Lilis Nurjanah.

K.H Yusuf Taujiri mulai memasuki kancah politik berawal dari Peristiwa Cimareme tahun 1919. Hal ini dikarenakan pada peristiwa tersebut tokoh-tokoh tua ditangkap oleh pemerintah kolonial, bahkan K.H Yusuf Taujiri pun termasuk tokoh muda yang ikut tertangkap dan dipenjarakan selama 2 tahun. Sejak itu estape perjuangan pergerakan melawan kolonial Belanda berpindah kepada generasi muda.

Pada tahun 1923, K.H Yusuf Taujiri mulai memiliki peran yang menentukan dalam organisasi pergerakan melalui SI (Sarekat Islam). SI pada kongres bulan Januari 1927 menetapkan tujuan organisasinya adalah kemerdekaan Indonesia dan sejak kongres itu SI berubah menjadi sebuah partai politik dan merubah namanya menjadi PSI (Partai Serikat Islam), kemudian pada tahun 1929 nama PSI disempurnakan menjadi PSII (Partai Serikat Islam Indonesia).

K.H Yusuf Taujiri semakin terkenal pada kancah politik perjuangan kemerdekaan, ketika ia aktif menjadi Dewan Sentral PSII (1931-1938). Sejak itulah ia berkenalan dengan S.M.Kartosuwiryo. Pada tahun 1936, di dalam tubuh partai terdapat dua pandangan dalam menghadapi penjajah, yakni kubu yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah (*cooperation*) dan kubu yang menolak (*non cooperation*). Khawatir akan kehancuran partai tahun 1934 sesudah kepemimpinan H.O.S Tjokroaminoto, maka Haji Agus salim yang mengetuai Dewan Partai, dalam kongres tahun 1936 mengusulkan pembentukan Komite

Barisan Penyedak dan usul itu ditolak oleh Abikoesno Cokrosuyoso. Kartosuwiryo diberi amanat oleh kongres untuk menyusun brosur tentang Hijrah, akibat perbedaan penafsiran tentang Hijrah, perpecahan ditubuh partai sudah tidak dapat diselesaikan, pemecatan pengurus partai terus berlangsung dan satu sama lain tidak saling menerima karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang kuat. Keputusan pemecatan S.M. Kartosuwiryo dan K.H Yusuf Taujiri yang pada akhirnya dibentuk suatu komite tantangan dengan nama Komite Pertahanan Kebenaran Partai Serikat Islam Indonesia (KPK PSII). Akibat perkembangan situasi dunia pemerintah Kolonial semakin memperketat akan keberadaan dan perkembangan partai, sehingga KPK PSII di bawah pimpinan S.M.Kartosuwiryo sulit berkembang menjadi suatu partai baru.

Dalam kongres KPK PSII tahun 1940, terjadi perbedaan pandangan pola perjuangan kemerdekaan Indonesia antar S.M. Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Taujiri, yang pada akhirnya lahir Darul Islam yang dipimpin oleh S.M.Kartosuwiryo dan Darussalam yang dipimpin oleh K.H Yusuf Taujiri. Lebih jelas lagi menurut Hiroko Horikoshi (1975: 64) bahwa perbedaan pandangan itu berawal dari:

There Kartosuwiryo proposed a total Hijrah, requiring every member of the party to contribute 2,500 kencing (unitr of currency) and to move to the Suffah. Kiai Yusuf disagreed with this and offered a counterproposal--- investing the money in land so that the harvest could be used to support the training of future ulama at the Suffah. Kiai Yusuf did not think that the time wa ripe for total Hijrah. For Many ulama, moving to a commune was almost impossible, since they had their regular religious and social services to perform in their respective villages. This disagreement was the beginning of the split between the leaders of the KPK.

Artinya:

Kartosuwiryo mengusulkan suatu Hijrah total, yang kemudian meminta kepada setiap anggota sebesar 2500 kencing (unit mata uang) untuk

bergerak ke Suffah. Kiai Yusuf menentang hal tersebut dan menawarkan suatu ide untuk menanamkan (investasi) uang tersebut kedalam suatu tanah garapan, sedemikian sehingga hasil dari panen bisa digunakan untuk mendukung pelatihan masa depan para ulama di Suffah. Kiai Yusuf tidak berpikir bahwa waktu itu adalah waktu yang matang untuk suatu Hijrah total. Karena bagi banyak ulama, memindahkan seluruh dari suatu komunitas itu merupakan suatu hal tidak mungkin, sejak mereka mempunyai kegiatan keagamaan yang rutin di kampung mereka masing-masing. Perselisihan paham ini adalah permulaan dari perpecahan antar pimpinan KPK.

K.H Yusuf Taujiri langsung mengundurkan diri dari kepengurusan KPK PSII. S.M. Kartosuwiryo, dan K.H Yusuf Taujiri menjadi teman seiring berbeda jalan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pandangan ini terhitung sejak mereka aktif dalam KPK PSII (Sobari, 2003: 3). Setelah keluar dari KPK PSII, K.H Yusuf Taujiri mendirikan mesjid dan pesantren yang diberi nama Darussalam, bertempat di Wanaraja, tapi beliau tetap mengajar di Pesantren Cipari.

Pada zaman revolusi Yusuf Taujiri membentuk laskar Darussalam, yang seterusnya menggabungkan diri ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Ketika BKR Jadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), sebagian laskar Darussalam diserahkan oleh K.H Yusuf Taujiri untuk membantu Divisi Siliwangi.

K.H Yusuf Taujiri pernah mengadakan pertemuan dengan penguasa Militer di Garut yakni Kolonel De Jong, membicarakan masyarakat selalu menjadi sasaran peluru Belanda, K.H Yusuf Taujiri mengusulkan agar masyarakat yang dicurigai tidak ditembak di tempat, tetapi ditangkap dan di proses secara hukum, selain itu juga beliau mengusulkan agar para pemuda Darussalam dilatih dalam kemiliteran. Latihan ini sebagai bukti partisipasi Darussalam terhadap Belanda

dalam menghadapi DI/TII, hal ini rupanya dapat dimengerti dan dengan berbagai pertimbangan Belanda dapat mengabulkan permintaan K.H Yusuf Taujiri.

Para pemuda yang dilatih itu sebenarnya adalah laskar Darussalam dan anggota TNI yang pura-pura tidak memiliki keterampilan militer. Dengan strategi itu, untuk sementara Darussalam dapat menghindari serangan dari Belanda dan dapat melindungi TNI yang kembali dari *Long March* yang melintasi daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Darussalam, kegiatan ini berlangsung sampai adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintahan Belanda pada tahun 1949.

Adapun Sikap politik K.H Yusuf Taujiri dalam menyikapi hasil dari perjanjian Renville antara RI dengan Belanda, secara pribadi K.H Yusuf Taujiri menyayangkan hasil perjanjian tersebut. Namun, meskipun begitu K.H Yusuf Taujiri menyikapinya dengan jiwa patriotisme tinggi. Dalam hal ini laskar Darussalam oleh K.H Yusuf Taujiri dibagi menjadi dua pasukan yakni sebagian diikutsertakan untuk melakukan Hijrah, termasuk anaknya yaitu Saep Darmawan. Sesampainya di Yogyakarta, pasukan Darussalam bergabung dengan Batalyon XI Mayor Umar Wirahadikusumah, setelah diserahkan dari batalyon Husinsyah. Sebagian pasukan lagi yang dipimpin langsung oleh K.H Yusuf Taujiri bersama-sama Hizbullah dan Sabilillah berkumpul mengangkat senjata melawan Belanda mempertahankan Jawa Barat yang berpusat di Gunung Cupu (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, pada tanggal 21 November 2006 dan Bapak Eddy Ahmad, 12 Desember 2006). Pasukan-pasukan yang mengangkat senjata,

termasuk didalamnya pasukan Darussalam, mengadakan perlawanan gerilya terhadap di Jawa Barat, sebagaimana ditulis oleh A.H Nasution (1995: 225) bahwa:

Sementara itu hubungan atau komunikasi antara pasukan-pasukan gerilya terus ditingkatkan, dan akhirnya tercapailah atau terbentuk dan tersusunlah jaringan-jaringan komunikasi itu. Misalnya pasukan JayaPangrengot/Kutwaringin pimpinan sugih Arto; pasukan SP-88 pimpinan Sumantri di Bendul, Purwakarta; pasukan pangeran papak pimpinan Jumhana dan Abubakar di Wanaraja, Garut; pasukan Bambu Runcing pimpinan Muhidin Nasution di Cibinong; pasukan Tirtayasa pimpinan S Hadi di Buahdua, Sumedang; pasukan Kalipaksi pimpinan Enoh di Wanaraja; pasukan Bahureksa pimpinan Oyon di Cipaku; pasukan Darussalam pimpinan Ajengan Yusuf Taujiri di Wanaraja, Garut; pasukan Sabilillah pimpinan Oni/Kartosuwiryo di Lemahputih, Gunung Cupu; dan pasukan Jayabaya pimpinan Rahmat Slamet di Tasikmalaya serta pasukan-pasukan gerilya lainnya.

Ketika pasukan-pasukan Siliwangi kembali lagi ke Jawa Barat, pasukan Darussalam ditugaskan untuk merintis jalan *Long March*, akibatnya pasukan Darussalam berangkat lebih awal 11 hari dari pasukan Siliwangi (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, pada tanggal 21 November 2006).

Adapun aktivitas organisasi dan politik yang pernah diikuti K.H Yusuf Taujiri selama hidupnya adalah pengurus Sarekat Islam, Pengurus PSII Cabang Garut 1931, Pengurus Dewan Sentral PSII 1931-1938, Komandan Hizbullah, dan yang terakhir beliau pernah menjadi anggota MPR RI. K.H Yusuf Taujiri meninggal dunia di Garut pada tahun 1982, dimakamkan di lingkungan pesantren Darussalam Wanaraja.

5.1.3 Perbedaan Pandangan Politik antara S.M.Kartosuwiryo dan K.H Yusuf Taujiri

S.M. Kartosuwiryo dan K.H Yusuf Taujiri merupakan dua tokoh yang selalu beriringan dalam satu organisasi (PSII, KPK PSII dan Masyumi) ataupun

dalam usaha melakukan perlawanan terhadap Belanda yang tergabung dalam Markas Dacrah Pertahanan Priangan (MDPP). Kedekatan kedua tokoh tersebut dalam tulisannya Hiroko Horikoshi (1975: 78) digambarkan bahwa:

Kiai Yusuf knew Kartosuwiryo for almost twenty years before they came into conflict. Both Families were in close contact because of their common interest in perjuangan politik (political struggle). Kartosuwiryo's father-in-law, Ardiwisastra, was himself a well-known figure in PSII circle in west Java. Kartosuwiryo's wife, Wiwiek, was also a militant activist and very close friend of Kiai Yusuf's younger sister, who headed the women's section of the GPPI in Garut. When Kartosuwiryo as expelled from the party, Kiai Yusuf also pulled out and supported indirectly both the KPK and Kartosuwiryo's Suffah Institute.

Artinya:

(Kiai Yusuf mengenal Kartosuwiryo untuk hampir duapuluh tahun sebelum mereka terlibat dalam konflik. Kedua keluarga mempunyai hubungan dekat, oleh karena minat mereka yang sama perjuangan politik. Mertua Kartosuwiryo, Ardiwisastra, merupakan figur terkenal dalam PSII Jawa Barat. Isteri Kartosuwiryo, Wiwiek, juga merupakan aktifis militan dan juga teman dekat dari adik perempuan kiai Yusuf, yang juga seorang pemimpin perempuan GPII di Garut. Ketika Kartosuwiro di usir dari partai, kiai yusuf juga mencabut dan mendukung secara tidak langsung kedua-duanya, yaitu KPK dan Institut Suffah yang didirikan oleh Kartosuwiryo)

Bentuk lain kedekatan antara kedua tokoh tersebut, sebagian pihak menyebutkan bahwa K.H Yusuf Taujiri merupakan guru spritual S.M. Kartosuwiryo, bahkan menurut Horikoshi (1975: 61) *Kiai Yusuf was the real spritual leader of the DI movement its first phase, and he supported it financially and militarily as well*, artinya “Kiai Yusuf adalah pemimpin spritual pada saat awal dari pergerakan DI, beliau juga mendukung DI dalam hal finansial dan militer juga”.

Adapun perpecahan antara S.M. Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Taujiri, berawal dari perbedaan paham mengenai penggunaan uang yang dipungut dari

setiap anggota KPK sebesar 2500 *Kencuring*, oleh Kartosuwiryo uang tersebut akan digunakan untuk biaya Hijrah ke Suffah, sedangkan keinginan dari K.H Yusuf Taujiri, uang tersebut sebaiknya diinvestasikan kesuatu tanah garapan, yang nantinya hasil panen dari tanah garapan tersebut bisa dipakai untuk biaya pelatihan para ulama Suffah di masa depan. Beda paham ini berujung kepada perbedaan pandangan pola perjuangan kemerdekaan Indonesia antar S.M.Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Taujiri, yang pada akhirnya pula lahirah Darul Islam yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo dan Darussalam yang dipimpin oleh K.H Yusuf Taujiri.

Perbedaan pola perjuangan antara Darul Islam dengan Darussalam yang mencolok antara lain, bahwa Darussalam dalam hal ini K.H Yusuf Taujiri pernah mengadakan pertemuan dengan penguasa Militer di Garut yakni Kolonel De Jong, beliau mengusulkan agar para pemuda Darussalam dilatih dalam kemiliteran. Latihan ini sebagai bukti partisipasi Darussalam terhadap Belanda dalam menghadapi DI/TII, hal ini rupanya dapat dimengerti dan dengan berbagai pertimbangan Belanda dapat mengabulkan permintaan K.H Yusuf Taujiri. Para pemuda yang dilatih itu sebenarnya adalah laskar Darussalam dan anggota TNI yang pura-pura tidak memiliki keterampilan militer. Dengan strategi itu untuk sementara Darussalam dapat menghindari serangan dari Belanda dan dapat melindungi TNI yang kembali dari *Long March* yang melintasi daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Darussalam, kegiatan ini berlangsung sampai adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintahan Belanda pada tahun 1949.

Kedekatan antara Darussalam dengan Belanda ini sangat tidak disukai oleh pihak Darul Islam, hal ini dibuktikan, sering kali setiap penyerangan yang dilakukan oleh Darul Islam kepada Darussalam, para anggota Darul Islam dalam setiap penyerangannya sering berteriak “*yeuh mantega ti Wihelmina*”, artinya “Rasakan nih mentega dari Wihelmina” sambil menembak dan melempar bom terhadap pasukan Darussalam di Cipari (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, pada tanggal 12 dan 21 November 2006) Hal tersebut, menurut penulis merupakan bentuk sindiran, hinaan dan kebencian dari pihak Darul Islam terhadap Darussalam atas kedekatannya dengan Belanda. yaitu penguasa militer di Garut yakni Kolonel De Jong.

Perbedaan lain dari S.M. Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Taujiri menyangkut dengan perspektif mengenai pendirian Negara Islam, yang mana hal ini merupakan salah satu sumber konflik di antara pemimpin-pemimpin Islam pada masa revolusi. Pandangan S.M. Kartosuwiryo tentang Negara Islam didasarkan pada proses mula terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW di awal abad pertama Hijriah (Al Chaedar, 1999: 63). Dalam perspektif Kartosuwiryo Islam memiliki konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara (*al-dien wa ad-daulah*). Gagasan Negara Islam bukanlah *wisful thinking*, tapi sebuah kenyataan historis. Bukan sekedar teori politik normatif (*normative political theory*), tapi teori politik empiris (*empirical political theory*). ‘Negara Madinah’ zaman Nabi Muhammad SAW membuktikan hal itu. ‘Negara Islam’ memang ‘alat’ belaka, tapi yang sangat diperlukan demi terealisasinya syariat-syariat Islam. Di luar Negara Islam yang ada hanyalah

negara *thagut*, sebuah pemaknaan simbolik Al-Qur'an bagi negara yang tidak didasarkan Islam.

Sedangkan pandangan K.H Yusuf Tadjiri, menghendaki Masyarakat Islam (*Islamic Society*) dengan kata lain mengislamkan masyarakatnya, bukan mengislamkan negaranya (mendirikan Negara Islam). Pernyataan tersebut tersirat dalam ucapan K.H Yusuf, yang sering dilontarkan kepada seluruh prajuritnya, kata-kata tersebut adalah [...] *Lamun imah ruksak disalah sahiji bagean imah saperti panto, ulah diruksak sakabeh imah, tapi panto weh nukudu dibeneurkeun [...] jeung ulah sakali-kali hyien imah dijero imah, artinya [...] kalau rumah rusak di antara salah satu tubuh rumah seperti pintu, jangan dirusak semuanya (rumah) tetapi pintu saja yang diperbaiki [...] dan jangan pernah membuat rumah di dalam rumah* (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, 21 November 2006). Oleh karena itu, K.H Yusuf Tadjiri menolak tuntutan ataupun ajakan S.M.Kartosuwiryo untuk ikut bergabung memproklamasikan Negara Islam Indonesia.

Perbedaan lain dari SM Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Tadjiri menyangkut dengan sikap politik yang diambil mengenai hasil perjanjian Renville antar RI dengan Belanda. Adapun Sikap politik K.H Yusuf Tadjiri dalam menyikapi hasil dari Persetujuan Renville antara RI dengan Belanda, secara pribadi K.H Yusuf Tadjiri menyayangkan hasil perjanjian tersebut. Namun, meskipun begitu K.H Yusuf Tadjiri menyikapinya dengan jiwa patriotisme yang tinggi. Dalam hal ini, laskar Darussalam oleh K.H Yusuf Tadjiri dibagi menjadi dua pasukan yakni, sebagian diikuti sertakan untuk melakukan Hijrah, bahkan

anaknyapun diikutsertakan dalam melakukan Hijrah yaitu Saep Darmawan. Sesampainya di Yogyakarta pasukan Darussalam, bergabung dengan Batalyon XI Mayor Umar Wirahadikusumah, setelah diserahkan dari Batalyon Husinskyah, sebagian pasukan lagi yang dipimpin langsung oleh K.H Yusuf Taujiri bersama-sama Hizbullah dan Sabilillah berkumpul mengangkat senjata melawan Belanda mempertahankan Jawa Barat yang berpusat di Gunung Cupu (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, pada tanggal 21 November 2006 dan Eddy Ahmad, 12 Desember 2006).

Adapun Sikap politik yang diambil oleh Kartosuwiryo terhadap Isi Persetujuan Renville adalah bersama dengan pasukannya yang terdiri dari Hizbullah dan Sabilillah sebanyak 4.000 orang, diputuskan untuk tetap tinggal di Jawa Barat, sebagai wujud penolakan S.M.Kartosuwiryo terhadap isi Persetujuan Renville (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 266). Adapun peristiwa penarikan mundur militer tentara Divisi Siliwangi oleh RI ke Jawa Tengah, ditambah dengan pendirian Negara Pasundan di Jawa Barat oleh Belanda, dipandang oleh Kartosuwiryo sebagai momen yang tepat untuk mewujudkan ambisinya yaitu mendirikan Darul Islam.

Perbedaan pendapat antara Kiai Yusuf dan Kartosuwiryo semakin tajam, ketika dikeluarkannya maklumat-maklumat Komademen Tertinggi APNII No. 4 dan 5, yang mewajibkan peleburan semua tentara ke dalam TII dan melarang semua partai dan organisasi. Kiai Yusuf juga tidak setuju dengan penagihan pajak (infaq) oleh DI dari rakyat, yang semakin hari semakin tinggi dan memberatkan rakyat (Dengel, 1995: 143).

5.2 Konflik fisik antara Darul Islam dengan Darussalam tahun 1948-1962

Pertempuran ataupun bentrok fisik antara militer dengan pasukan DI/TII, selama periode tahun 1950-an sering terjadi di seluruh daerah di Garut. Adapun Bentrokan fisik antara militer dengan DI/TII di kota Garut di antaranya diberitakan dalam koran Pikiran Rakyat, Selasa 2 Januari 1951, bahwa:

[...] Belum djuga penduduk lepas dari ketjemasan sedemikian itu, pada hari sabtu djam 8 pagi, markas Apri di Tjipajaran discrang kembali. Penjerangan hebat ini berlaku dari djam 8 pagi. Gerombolan merupakan barisan penyerangan jang teratur secara penjerangan umum dengan terang-terangan dan berpakaian seragam persis serupa benar dengan seragam Apri. Pertempuran ini adalah jang terhcbat dalam penjerangan jang pernah ditujukan terhadap tempat-tempat di sekitar Kadungora Leles. Gerombolan dan Apri bertempur dengan jarak hanja 15 meter. Demikian berita dari orang-orang jang berdekatan kepada kedjadian pertempuran tersebut. Penduduk banyak jang mengungsi ke tempat jang masih aman. Korban kedua belah pihak belum dapat dipastikan, tetapi di Tanggulun paling banjak jang luka-luka. Serangan-serangan tersebut ditujukan dimana markas Apri berada, Tanggulun, Tjisaat, Tjipajaran, Tjikembulan, dan Hudjung, terlihat api menjala-jala dimana rumah rakyat mendjadi hangus

Kemudian koran Pikiran Rakyat, Jumat 15 Agustus 1952, bahwa:

Pada tanggal 11 Agustus pukul 19.30 gerombolan pengacau yang terdiri dari 20 orang yang bersenjata lengkap dan berpakaian seragam dari kampung Wates desa Lebakjaya telah melalui jalan raya sebelah selatan menuju kampung Sukaraja Cikalmeneng desa Suci, satuan tentara yang berada di pos Paledang yang sedang mengadakan patroli di kampung tersebut berhadapan dengan gerombolan itu terjadi tembak-menembak yang dimulai oleh gerombolan, dalam pertempuran ini pihak gerombolan mundur kejurusan selatan korban adalah seorang rakyat dari kampung Kamasan yang terkena peluru nyasar pada kaki sebelah kanan.

Selain itu, diberitakan pula dalam Pikiran Rakyat, 22 Agustus 1952, bahwa:

Ketika hari rabu jam 6 pagi jalan yang kemudian dilaporkan kepada Luiarah Jabarea, oleh lurah diteruskan kepada TNI jam 10.30 siang telah terjadi pertempuran antara TNI dengan gerombolan, dalam pertempuran ini pihak gerombolan telah dipukul mundur ke Cibola dan Jati dengan dihujani tembakan mortir. Korban dari kedua belah

pihak belum diketahui. Pada tanggal 21 Agustus senja hari segerombolan pengacau dengan berpakaian seragam telah mencoba hendak mengacau di desa Sukaratu kampong Cilengkrang Kabupaten Garut, tetapi tidak diketahui pada waktunya sehingga dapat diadakan pembersihan, di dalam pengejaran TNI telah dilepas tembakan mortir, TNI dari C.E.C III plat.B. telah berhasil menggagalkan pengacauan gerombolan pertempuran sampai pukul 6 pagi masih berjalan terus.

Dari ketiga sumber koran di atas tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 1950-an terjadi gerakan besar-besaran dari tentara DI/TII, namun selain dari itu dari pihak tentara RI pun mulai juga mengadakan pembersihan secara besar-besaran. Oleh karena itu pertempuran antara kedua belah pihak menghebat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Adapun bentrokan fisik di antara golongan Islam di Kota Garut memang pernah terjadi semasa gerakan DII/TII Kartosuwiryo. Banyak kaum bumiputra yang dijadikan 'alat' oleh Kartosuwiryo untuk tujuan politisnya, sehingga terjadi bentrokan senjata antara pengikut Islam di pihak pemerintah RI melawan pengikut Islam di pihak Kartosuwiryo (Sofianto, 2001: 131) Hal ini terjadi juga di Wanaraja, pengikut Islam di pihak pemerintah RI yaitu laskar Darussalam yang dipimpin oleh K.H Yusuf Taujiri, melawan pengikut Islam di pihak Kartosuwiryo. Pertentangan ataupun perbedaan pandangan politik, sampai kepada perbedaan sikap politik antara pimpinan DI yaitu Kartosuwiryo dengan pimpinan pasukan Darussalam yaitu K.H Yusuf Taujiri, berujung kepada suatu konflik fisik yang tak kurang dari 46 kali pihak DI/TII menyerang pihak Darussalam.

Pada bulan Agustus 1949 permusuhan-permusuhan militer langsung antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) termasuk pula badan-badan perjuangan yang independen seperti Darussalam dan lain-lain melawan Tentara Islam Indonesia

(TII) selama hampir enam bulan. Sejak aksi polisional kedua dan seterusnya Kartosuwiryo menganggap Jawa Barat sebagai wilayah *de facto* NII. Ketika Divisi Siliwangi dari Tentara Nasional Indonesia kembali ke Jawa Barat selama awal 1949, kedatangan mereka dianggap sebagai pelanggaran yang mencolok mata terhadap kewibawaan Negara berdaulat yaitu Negara Islam Indonesia.

Bentrokan pertama antara kedua tentara itu, terjadi di Malangbong Garut, Jawa Barat, pada tanggal 25 Januari 1949, yang sering disebut Peristiwa Antralina. Sehari setelah peristiwa pertempuran antar DI/TII dengan pasukan Mayor Rivai di Antralina, yaitu pada tanggal 27 Januari 1949 S.M. Kartosuwiryo mengirim ultimatum kepada K.H Yusuf Tadjiri agar Darussalam dapat menentukan sikap apakah berdiri di pihak DI atau RI.

Tanggal 30 Januari 1949, Pesantren Darussalam kedatangan pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Mayor Rivai, peristiwa ini membuat semakin marahnya S.M. Kartosuwiryo, oleh karena itu setelah pasukan Siliwangi meninggalkan Pesantren Darussalam, pasukan DI/TII mengepung kampung Cipari, menggeledah rumah penduduk untuk menangkap K.H Yusuf Tadjiri, dari peristiwa itu sebanyak 30 laskar Darussalam tertangkap dan harus menyatakan setia atau dibunuh, setelah mereka menyatakan kesetiaannya kepada DI, mereka dilepas, namun pernyataan itu hanyalah sekedar taktik dari pasukan Darussalam untuk bisa lepas dari Darul Islam.

Pasukan Darussalam yang berbasis di Pesantren Cipari menjadi target utama serangan DI selama periode 1949-1958, serangan yang terbesar terjadi pada tanggal 17 April 1952 dan 5 Agustus 1952, lain dari pada tanggal-tanggal itu

serangan DI ke Cipari menurut Saep Darmawan “[...] hanya sebatas tembak-menembak selang waktu hanya 5-10 menit, setelah itu pertempuran selesai, itu pun serangan dengan skala kecil” (Hasil wawancara, pada tanggal 12 dan 21 Nopember 2006).

5.2.1 Peristiwa 17 April 1952

Salah satu serangan terbesar DI kepada Darussalam yang terjadi pada tanggal 17 April 1952, menurut Horikoshi (1975: 84) bahwa, *“The Battle lasted until three o'clock in the morning, shortly before the subuh (dawn) prayers. During the night the three thousand TII soldiers made three advances”*, artinya “bahwa tembak-menembak itu berlangsung sampai pukul tiga pagi, dan berhenti sebelum sholat subuh tiba. Sekitar 3000 anggota TII melakukan tiga kali serangan”.

Peristiwa penyerangan DI/TII terhadap Darussalam pada tanggal 17 April 1952, diawali sepasukan DI/TII bergerak ke arah Desa yang datang dari arah selatan, tidak seperti biasanya yang biasa muncul dari gunung-gunung sebelah utara. Kedatangan Pasukan DI/TII ke Darussalam sekitar menjelang Isya, sekitar pukul setengah tujuh malam, serangan tiba-tiba ini merupakan ciri khas dari kaum pemberontak, seperti apa yang dikemukakan Karl D. Jackson (1990: 22) bahwa Kaum pemberontak (DI/TII) bergerak maju secara tiba-tiba untuk menyerang dan membakar desa-desa, kantor pemerintah, pos-pos TNI, mobil, bis dan kereta Api.

Kondisi dan situasi di kampung Cipari, penduduk yang berada di sekitar Kawasan Pesantren Cipari, sejak magrib, sebagian besar penduduk telah

mengungsi ke Cipari masuk ke gedung madrasah dan Mesjid Cipari. Kedatangan pasukan DI/TII, awalnya diketahui oleh salah satu saudara sepupu K.H Yusuf

Taujiri dari pihak ibu, berikut penggalan kisahnya dalam *Tempo* (1984: 61):

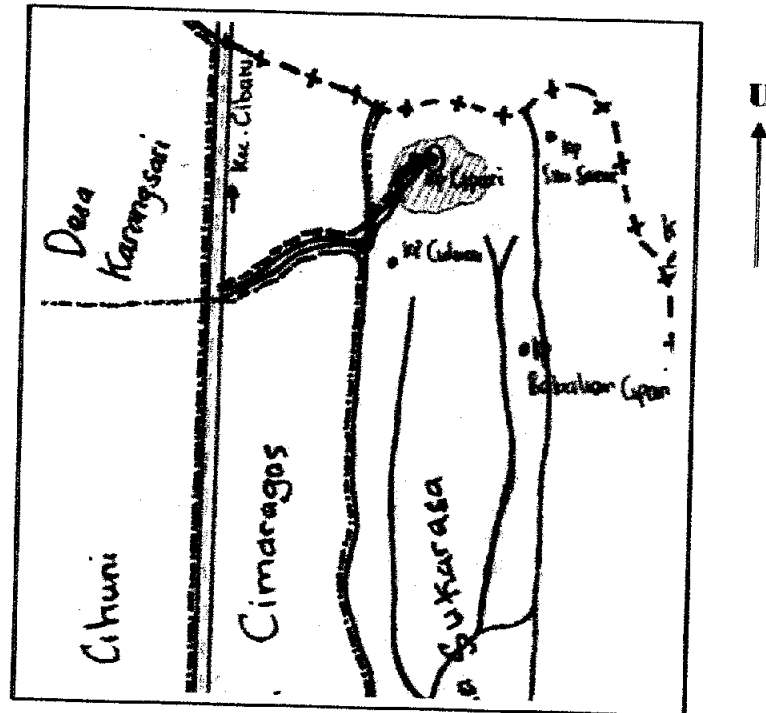
Pada hari itu saya menghadiri rapat di Cimahi, dan baru sore hari berganti pakaian ketika istri saya membisikkan, ada patroli diluar rumah. Segera saja saya menyadari bahwa itu bukan patroli biasa, dari pos polisi kecamatan, melainkan sepasukan DI/TII yang sedang bergerak ke arah desa. Saya tarik badan isteri saya, dan kami bersembunyi di balik tirai sambil mengintip. Tidak biasanya TII datang ke desa sesore itu, dan dari arah selatan pula. Biasanya mereka muncul dari gunung-gunung sebelah utara. Hari itu saya terlambat pergi ke madrasah, tapi hal itu pulalah yang menyelamatkan jiwa kami.

Berita kedatangan DI ke Cipari, diketahui juga oleh Hajah E. Kuraesin adik kandung Yusuf Taujiri, berikut penuturannya dalam *Tempo* (1984: 61):

Kami mendengar berita pasukan DI/TII sudah mendekat Cipari menjelang Isya, sekitar pukul setengah tujuh malam. Sejak Magrib, sebagian besar penduduk yang mengungsi ke Cipari masuk ke gedung madrasah. Tapi karena rumah kami berdekatan dengan madrasah, kami masih berada di rumah. Kakak perempuan saya, yang selalu kebingungan jika ada hal-hal yang tak lazim, mulai berteriak-teriak "DI sudah datang" Ia melompat kesana-kemari. Mula-mula saya tak percaya, karena masih terlalu sore. Tapi ketika saya lihat rumah di seberang rumah kami mulai dimakan api, kemudian mendengar bunyi kentongan dipukul, keraguan saya lenyap. Ibu saya yang berusia delapan puluh tahun, meloncat lewat jendela bersama dua cucunya. Melalui pekarangan rumah mereka berlari ke Madrasah. Saya membantu kakak saya yang ketakutan, dan kami selamat juga sampai di Madrasah.

Pada tanggal 17 April 1952, pasukan TII menyerang dan mengepung pesantren Darusalam, yang hanya dipertahankan Kiai Yusuf Taujiri bersama anak buahnya dengan 7 senapan tua, pistol dan granat tangan. Peristiwa ini merupakan puncak pertentangan antara kedua tokoh ini dan Kartosuwiryo waktu itu memang bermaksud menghabisi Kiai Yusuf beserta keluarganya dan para pengikutnya

pengikutnya (Dengel, 1995: 143). Untuk lebih jelas arah pergerakan DI/TII waktu masuk ke Cipari pada tanggal 17 April 1952, dapat dilihat dari peta di bawah ini:



- Ket :
 - - - - - → : Arah pergerakan DI/TII menuju Cipari
 - + - + - + - : Batas Administrasi Kecamatan
 - - - - - : Batas Desa
 Daerah yang diarsir : Lokasi Kampung Cipari
 ○ : Lokasi Pesantren Cipari

C. Peta arah pergerakan DI menuju cipari, 17 April 1952. (Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan pada tanggal 21 November 2006, dan arsip Pemerintahan Kecamatan Wanaraja 1994)

Berdasarkan peta tersebut, bahwa jalan yang dipakai oleh Darul Islam dalam usahanya menyerang kepada basis pasukan Darussalam di Pesantren Cipari, pasukan DI awalnya terkonsentrasi dipertigaan jalan raya menuju Cibatu, kemudian pasukan DI melewati jalan perkampungan Desa Cimaras yang diteruskan menuju perkampungan Cipari. Dalam penyerangan kali ini terlihat pasukan DI ingin menunjukkan kekuatan dari pasukannya terhadap penduduk

sekitar, khususnya terhadap pasukan Darussalam. Hal ini terbukti dengan kekuatan DI yang berjumlah ± 3000 orang dengan dilengkapi persenjataan yang lengkap melakukan konvoi sepanjang jalan menuju kampung Cipari.

Sepanjang jalan menuju kampung Cipari, pasukan DI melakukan terror berupa pembakaran rumah-rumah penduduk sekitar. Penduduk tidak sempat untuk melakukan perlawanan dikarenakan penyerangan itu dilakukan secara tiba-tiba dan dari arah yang tidak seperti biasanya yang biasa muncul dari gunung-gunung sebelah utara, sehingga banyak dari penduduk mengungsi ke Pesantren Cipari. Serangan DI kali itu baru menghadapi perlawanan setelah mencapai Pesantren Cipari. Perlawanan itu dilakukan oleh pasukan Darussalam dan dibantu penduduk yang ikut serta berjuang melawan DI.

Proses tembak-menembak pada peristiwa itu berlangsung dari sekitar pukul tujuh malam sampai pukul tiga pagi. Tentara Islam Indonesia (TII) dengan senjata lengkap melakukan tiga kali serangan terhadap Darussalam, yang persenjataanya sama sekali tak cukup. *"Yang ada hanya tujuh pucuk senapan, di samping pistol Kiai buatan Kanada, lima Karaben Jepang di antaranya peninggalan pasukan Siliwangi dan dua senapan dorlok. Buatan dalam negeri dan yang banyak adalah granat tangan"*, tutur Hajah Kuraesin, *Tempo* (1984: 62). Proses penyerangan TII terhadap Darussalam pertama-tama membakar rumah-rumah yang ada di kampung dan sekitar pesantren Cipari, kemudian baru menyerang Mesjid Cipari, yang notabene tempat pasukan Darussalam dan para pengungsi bertahan.

Dalam proses perlawanan terhadap pasukan TII, Kiai Yusuf Taujiri berdiri di dalam menara mesjid, melemparkan granat kepada TII yang sedang bergerak

mengepung Masjid Cipari. Selama pertempuran berlangsung, semua jendela madrasah pecah kena peluru, dan banyak pengungsi dalam madrasah terluka kena pecahan kaca. Seorang anggota pengawal Kiai Yusuf yang bernama Bohim, berdarah di dahi, tetapi dengan kondisi tersebut tidak menghalangi Bohim untuk terus menembak kearah anggota TII.

Dikarenakan pertempuran yang cukup memakan waktu lama, dua senapan di pihak Cipari yang terus-menerus digunakan untuk melawan tembakan dari TII, akhirnya kepanasan dan rusak, yang tersisa tinggal lima, tetapi tidak lama kemudian satu senapan lagi ikut rusak. Salah seorang pengawal Kiai Yusuf, yang bernama Oyoh, kehabisan peluru. Ia mengambil keputusan nekat, dengan maksud mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Kiai, Oyoh dengan menggenggam sebuah granat tangan, dan tanpa menghiraukan orang lain yang berusaha mencegahnya, ia lari keluar mendekati beberapa anggota TII, lalu melemparkan granat kepada mereka. Namun, sebelum ia bisa kembali ke madrasah, salah satu peluru dari TII membuatnya roboh dan akhirnya meninggal dunia.

Pada pertempuran itu, pihak Cipari sangat kekurangan peluru, sedangkan granat cukup banyak, dengan kondisi seperti itu, Kiai Yusuf memerintahkan anak buahnya untuk menembak sasaran (tentara DI) yang sedang bergerak menyerang ke arah mesjid saja. Hal tersebut merupakan sebuah strategi yang efektif dari K.H Yusuf Taujiri untuk meminimalisir penggunaan senjata dalam melawan TII.

Serangan TII berlangsung dua sampai tiga jam. Lalu istirahat kira-kira setengah jam, sebelum mulai menembak lagi. Saat paling mengerikan tiba, ketika TII mencoba mendobrak tembok barat mesjid. Karena tembok itu menghadap

kiblat, tak ada jendela disana, dan karena itu tak ada tempat untuk menembakkan senapan kearah TII, kecuali dari atas menara mesjid. TII mencoba menjebol tembok tersebut dengan sebuah lemparan granat, tetapi ledakan dari bom tersebut, hanya bisa membuat lubang kecil pada tembok mesjid, hal tersebut dikarenakan tembok mesjid itu sangat tebal, lubang tersebut hanya bisa dimasuki laras senapan tentara Islam Indonesia (TII).

Selama pertempuran berlangsung antara DI/TII dengan Darussalam, tiga orang penduduk yang berlindung di Mesjid dan ikut berjuang tewas. Pertama adalah Bulo, yang mencoba melemparkan granat kepada TII tapi meleset, granat itu mengenai jendela, lalu terpental kembali dan merenggut nyawanya. Yang dua orang lagi terkena peluru TII. Keseluruhan korban dipihak Darussalam berjumlah sebelas jiwa, empat anggota pasukan pengawal dan tujuh penduduk.

Pertempuran yang berlangsung \pm 8 jam, pasukan TII baru mundur ketika subuh tiba. Pasukan TII mundur dan pergi ke arah pegunungan sebelah utara kawasan Cipari. Setelah semua pasukan TII menyingkir ke pegunungan, orang-orang Cipari yang sebelumnya bertahan di madrasah, akhirnya bisa berani keluar. Baru beberapa hari kemudian, kehidupan di Cipari pulih kembali. Tapi, ternyata, berlusin-lusin mayat TII ditemukan penduduk di sawah dan kolam ikan '*balong*'. Untuk waktu yang lama tak ada orang yang mau bekerja di sawah; ikan di kolam pun tak ada orang yang mau memakannya.

5.2.2. Peristiwa 5 Agustus 1952

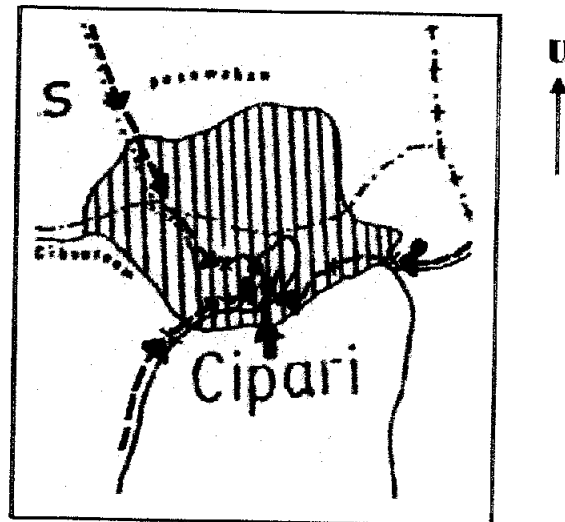
Selang beberapa bulan dari peristiwa tersebut, yaitu tepatnya tanggal 5 Agustus, penyerangan dari pihak Darul Islam kepada Darussalam terjadi kembali. Menurut berita resmi koran Pikiran Rakyat, Jumat 8 Agustus 1952, memberitakan bahwa:

Jumlah orang-orang yang menjadi korban serangan atas kampung Cipari Sukawening Kecamatan Wanaraja Garut tanggal 5 Agustus itu adalah 24 orang meninggal 23 orang mendapat luka, jumlah rumah yang terbakar di Cipari ada 58 buah. Pengumuman itu membenarkan berita-berita bahwa gerombolan itu memusatkan serangannya kepada pesantren, rumah dan Mesjid kiai Yusuf Taujiri. Tapi Kiai itu sekarang masih selamat. Selanjutnya diterangkan bahwa gerombolan sekarang itu telah terpukul mundur ke daerah Cisit, Sadahurif dan Cinta. Mengenai jumlah korban yang meninggal tersebut di atas dapat terbagi kedalam 15 korban mayat gerombolan dan 9 mayat penduduk Cipari.

Pada pertempuran ini, orang-orang yang ikut berjuang melawan DI, di antaranya adalah Yusuf Taujiri, ajengan Abdul Kudus, Ahmad Marko, Bahtiar, Solihin, Saep Darmawan, Asikin dan masih banyak lagi (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, pada tanggal 12 dan 21 Nopember 2006).

Dalam melaksanakan penyerangannya, pihak DI telah mengerahkan pasukannya yang berjumlah \pm 1500 orang, lengkap dengan dipersenjatai seperti *Brend*, *Standgun*, *Mortir*, dan lain-lainya (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, tanggal 12 dan 21 November 2006). Pertempuran antara Darul Islam dengan Darussalam yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 1952, tipe penyerangannya hampir sama, yaitu dimulai dari luar kampung Cipari, namun pada saat itu kampung Cipari oleh masyarakat sekitar, telah dibuat suatu benteng untuk pertahanan.

Untuk lebih jelas, laju pertempuran mulai dari luar kampung sampai masuk ke Cipari, dapat dilihat dari peta di bawah ini:



- Ket :
 - - - - - > : Arah pergerakan DI/TII menuju Cipari
 - + - + - + - : Batas Administrasi Kecamatan
 x x X X X : Titik-titik pertempuran antara DI dan DS
 - . - . - . - : Batas Administrasi Desa
 Daerah yang diarsir : Wilayah perkampungan Cipari
 ○ : Lokasi Pesantren Cipari

D. Peta Laju Pertempuran DI/TII dengan Darussalam di Cipari, 5 Agustus 1952 (Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan bapak Saep Darmawan pada tanggal 21 November 2006 dan dari arsip Ahman Sya, 1988)

Berdasarkan peta dari atas, terlihat bahwa Pasukan DI tidak mau mengulang lagi kegagalan pada penyerangan tanggal 17 April 1952. Meskipun dengan jumlah anggota pasukan setengah dari jumlah pasukan pada penyerangan DI pada tanggal 17 April 1952, namun terlihat ada suatu perbedaan strategi penyerangan yang dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan menghabisi pasukan Darussalam. Kali ini pasukan DI menggunakan strategi penyerangan dari tiga arah, sebelah utara dari daerah pesawahan, sebelah timur dari kampung Situ Sacur, dan sebelah

selatan dari jalan perkampungan Desa Cimaragas yang kemudian menuju perkampungan Cipari.

Pada mulanya pihak DI menduga tidak akan mengalami perlawanan atau penghadangan dalam penyerangan itu, akan tetapi kenyataannya, sebelum pihak DI dapat mencapai tujuannya, yaitu membumi hanguskan Pesantren Cipari. Pihak DI harus menghadapi hadangan atau perlawanan dari pasukan Darussalam sejak dari luar kampung Cipari. Namun, meskipun begitu pasukan DI tetap mampu menembus barikade pertahanan yang dibentuk oleh pasukan Darussalam, sehingga pasukan Darussalam terdesak dan kemudian pertempuran berlanjut di dalam kampung Cipari, akibatnya kampung Cipari oleh DI habis dibakar. Pertempuran di dalam kampung pun, pasukan Darussalam tidak bisa bertahan lama, akhirnya pasukan Darussalam mundur ke pos terakhir yaitu Mesjid Cipari.

Pertempuran pada saat itu yang terhitung sengit, telah dua kali berlangsung antara pasukan DI dengan DS, yaitu pada saat di dalam perkampungan dan di Pos terakhir yaitu di mesjid. Pertempuran yang terakhir ini pasukan Darussalam terlindung oleh tembok mesjid yang tebal, sehingga para pengungsi dan tentara pasukan Darussalam aman berlindung di dalam mesjid.

Sama seperti kejadian pada waktu penyerangan DI/TII pada tanggal 17 April 1952, dalam melakukan proses perlawanan terhadap pasukan TII, Kiai Yusuf Taujiri berdiri di dalam menara mesjid, yang berbeda pada pertempuran ini Kiai Yusuf sudah dilengkapi dengan senjata *Standgun* dan granat, oleh karena itu Kiai menembak dan melemparkan granat ke arah TII yang bergerak mencoba masuk ke Mesjid Cipari.

Menara mesjid ini, menjadi sangat strategis dan vital untuk menghadang pergerakan DI/TII menuju Mesjid Cipari. Dari menara mesjid ini yang tingginya ± 20 meter, dan bergaris tengah 1 meter, bisa memantau ke seluruh luar kawasan Mesjid Cipari. Tentunya hal ini sangat mempersulit pergerakan DI menuju mesjid, oleh karena itu, menara ini pun menjadi sasaran utama untuk dilumpuhkan oleh DI, namun tidak berhasil, yang ada hanya tubuh menara mesjid ini penuh dengan bekas hujaman peluru Tentara Islam Indonesia.

Seperti pada pertempuran pada tanggal 17 April 1952, penyerangan DI/TII pada tanggal 5 Agustus 1952, gagal memenuhi target, yaitu menghabisi Yusuf Tadjiri beserta pasukan Darussalamnya. Pada penyerangan kali ini, 24 orang meninggal, 23 orang mendapat luka, jumlah rumah yang terbakar di Cipari ada 58 buah. Mengenai jumlah korban yang meninggal tersebut di atas, dapat terbagi ke dalam 15 korban mayat gerombolan dan 9 mayat penduduk Cipari (Pikiran Rakyat, 8 Agustus 1952)

5.2.3 Akhir Pertentangan antara Pasukan Darul Islam dengan Pasukan Darussalam

Selama periode 1953-1957 penyerangan Darul Islam terhadap pasukan Darussalam terus berlangsung, namun penyerangan Darul Islam tersebut menurut Saep Darmawan “[...] hanya sebatas tembak-menembak selang waktu hanya 5-10 menit, setelah itu pertempuran selesai, itu pun serangan dengan skala kecil” (Hasil wawancara, pada tanggal 12 dan 21 Nopember 2006).

Menurunnya intensitas penyerangan Darul Islam terhadap Darussalam, dikarenakan semakin intensifnya pertempuran-pertempuran antara DI dengan TNI, yang pada saat itu pihak TNI sedang gencar-gencarnya melakukan penumpasan “pembersihan” terhadap gerakan DI/TII. Intensitas penyerangan Darul Islam terhadap Darussalam yang semakin menurun ini diakibatkan juga secara tidak langsung oleh bertambahnya kekuatan pasukan Darussalam yang setelah tahun 1952 kekuatannya sudah lebih dari satu Pleton (30-50 orang), ditambah lagi pasukan Darussalam telah dipersenjatai oleh Batalyon setempat dan oleh PST (Perwira Staf Militer) yang sekarang disebut Kodim (Komando Distrik Militer). (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, pada tanggal 12 dan 21 Nopember 2006).

Pada tahun 1954, dalam usahanya menumpas gerakan DI/TII di daerah Wanaraja, pihak pasukan Darussalam pernah diperbantukan untuk membantu TNI menggempur basis DI/TII di kampung Cinta Sukawening. Bantuan dari pasukan Darussalam ini sangat membantu TNI, dikarenakan pasukan Darussalam mengetahui sangat betul daerah yang akan digempur tadi. (Hasil wawancara dengan Bapak Saep Darmawan, pada tanggal 12 dan 21 Nopember 2006).

Periode tahun 1955-1957 merupakan tahun yang paling sulit bagi Divisi Siliwangi. Boleh dikatakan bahwa pada waktu itu, setiap minggunya ada saja pos-pos Siliwangi yang diserang oleh DI/TII, contohnya di daerah Wanaraja Pos Siliwangi yang berada di Sadang tak luput dari serangan DI/TII, sampai-sampai pos Siliwangi yang ada di Sukadana yang notabene berada diwilayah Garut kota

tak luput juga dari serangan DI/TII. (Hasil Wawancara dengan Bapak Momod, pada tanggal 21 Nopember).

Divisi Siliwangi berjuang membendung arus ofensif DI/TII, dengan mengerahkan daya mampunya yang ada secara maksimal, Divisi Siliwangi pada tahun itu telah menerjunkan eselon-eselon tempurnya untuk melakukan gerakan-gerakan militer dalam bentuk ofensif di dalam rangka mencapai keadaan titik berimbang alias membuntukan ofensif DI/TII.

Ahli-ahli siasat Divisi Siliwangi dalam pada itu telah melahirkan pula suatu taktik yang disebut "Isolasi Total" yang kemudian akan menjadi termashur dengan nama "Pagar Betis". Dalam rangka penumpasan DI/TII, maka wilayah Jawa Barat dibagi dalam daerah-daerah operasi. Daerah-daerah operasi itu sendiri dibagi lagi sesuai dengan tingkat-tingkat pemulihan keamanan, ke dalam type A, B dan C terkenal dengan sebutannya DO-A, DO-B, dan DO-C.

DO-A adalah daerah dimana telah tercapai normalisasi keadaan. DO-B adalah daerah dimana situasi sudah dapat kita control, tetapi pihak DI/TII masih merupakan gangguan. DO-C ialah daerah dimana masih dalam gangguan DI/TII sepenuhnya. Dan diharapkan dengan taktik ini DO-C itu lambat laun akan menyempit wilayahnya, untuk berkembang menjadi DO-B guna selanjutnya menjadi DO-A. Maka untuk itu, rakyat pun diikut sertakan itulah dasar-dasar daripada lahirnya taktik "Pagar Betis". Dalam wadah Pagar Betis " inilah, maka Divisi Siliwangi memberikan tempat yang sewajar-wajarnya kepada rakyat warga Jawa Barat di dalam rangka usaha ikut serta didalam berjuang, memulihkan keamanan kampung halaman Jawa Barat.

Kondisi Darul Islam pada tahun 1958 sampai tahun 1960-an kekuatannya semakin menurun, bahkan dengan operasi Pagar Betis yang dilancarkan TNI dan masyarakat di tahun 1962 pergerakan DI/TII ini musnah, ditandai tertangkapnya S.M. Kartosuwiryo dengan operasi 'Pagar Betis' yang dilakukan tentara Siliwangi dibantu oleh masyarakat setempat.

Setelah berakhirnya gerakan DI/TII kehidupan pesantren Darussalam mulai normal kembali dan pendidikan mulai dijalankan kembali, namun ketenangan ini kembali terganggu oleh semakin meluasnya paham komunis. Hal ini bisa terjadi karena disokong oleh beberapa pimpinan-pimpinan negara dan oknum petinggi militer. K.H Yusuf Taujiri yang sudah memperkirakan dan memperhitungkan akan keberadaan PKI, sehingga beliau dan ulama-ulama bersepakat untuk siap sedia menghadapi pengkhianatan PKI. Para pemuda dan pelajar yang tergabung pada organisasi pelajar yakni PII (Pelajar Islam Indonesia) dipersiapkan dilatih agar pada waktunya sudah siap menghadapi kemungkinan paling buruk. Pasukan Darussalam bersama TNI yang tidak terlibat PKI menyebar ke berbagai pelosok Garut bahkan sampai ke Tasikmalaya, Bandung, Sumedang, Ciamis dan lain sebagainya bersama-sama masyarakat yang dikunjungi menumpas PKI malah sampai ke Yogyakarta (Sobari, 2003: 6).

Setelah pemberontakan PKI, K.H Yusuf Taujiri mengaktifkan kembali majelis ta'limnya yang ada di Wanaraja dan sampai sekarang masih tetap eksis dan lembaga pendidikan yang diprakarsainya merupakan lembaga pendidikan yaitu TK, MTS, dan SMU.

BAB VI

KESIMPULAN

Rentetan peristiwa sejarah mengisi dinamika revolusi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya sejarah Indonesia mencatat suatu gerakan Darul Islam, yang pada akhirnya menjadi suatu gerakan pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, seorang tokoh Islam problematis dan kontroversial.

Gerakan DI/TII tersebar diberbagai wilayah di Jawa Barat. Di Garut, khususnya di daerah Wanaraja, DI/TII mendapat perlawanan dari Pasukan Darussalam yang dipimpin oleh K.H Yusuf Tadjiri, seorang tokoh Islam yang merupakan pemimpin spritual pada saat awal pergerakan DI, dan juga tokoh spritual dari S.M. Kartosuwiryo sendiri.

Permasalahan konflik antara Darul Islam dengan Darussalam di atas merupakan permasalahan utama yang oleh penulis, telah dikaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian dengan metode historis. Setelah penulis melakukan telaah terhadap permasalahan utama, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, di antaranya akan dipaparkan pada paragraf-paragraf di bawah ini:

Pertama, munculnya gerakan DI/TII khusus di Wanaraja, sangat mengganggu terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Wanaraja, mulai dari aspek pendidikan, agama, sosial, dan politik. Akibatnya masyarakat Wanaraja,

khususnya yang berada dipinggiran, banyak yang mengungsi ke tempat yang aman, contohnya pusat kota Garut.

Kedua, latar belakang terjadinya konflik antara Darul Islam dengan Darussalam pada dasarnya diakibatkan adanya beda paham, beda kepentingan dan beda tujuan, sehingga menimbulkan friksi antara Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Tadjiri. Perpecahan ini merembet kepada perbedaan sikap politik yang diambil oleh kedua tokoh tersebut, dan pada akhirnya berujung kepada konflik fisik.

Ketiga, perbedaan paham antara kedua tokoh tersebut, berawal dari perbedaan paham mengenai penggunaan uang yang dipungut dari setiap anggota KPK PSII, oleh Kartosuwiryo uang tersebut akan digunakan untuk biaya Hijrah ke Suffah, sedangkan keinginan dari K.H Yusuf Tadjiri, uang tersebut sebaiknya diinvestasikan kesuatu tanah garapan, yang nantinya hasil panen dari tanah garapan tersebut, bisa dipakai untuk biaya pelatihan para ulama Suffah di masa depan. Selanjutnya perbedaan pendapat antara Kiai Yusuf dan Kartosuwiryo semakin tajam, ketika dikeluarkannya Maklumat Komandemen Tertinggi APNII No. 4 dan 5, yang mewajibkan peleburan semua tentara ke dalam TH dan melarang semua partai dan organisasi. Dan Kiai Yusuf juga tidak setuju dengan penagihan pajak (infaq) oleh DI dari rakyat, yang semakin hari semakin tinggi dan memberatkan rakyat.

Keempat, perbedaan pola perjuangan antara Darul Islam dengan Darussalam yang mencolok antara lain, bahwa Darussalam dalam hal ini K.H Yusuf Tadjiri sering menggunakan strategi 'tipu daya', contohnya K.H Yusuf pernah mengadakan pertemuan dengan penguasa Militer di Garut yakni Kolonel De Jong,

beliau mengusulkan agar para pemuda Darussalam dilatih dalam kemiliteran. Para pemuda yang dilatih itu sebenarnya adalah laskar Darussalam dan anggota TNI yang pura-pura tidak memiliki keterampilan militer. Dengan strategi itu, untuk sementara Darussalam dapat menghindari serangan dari Belanda dan dapat melindungi TNI yang kembali dari *Long March*. Contoh kedua, ketika pasukan DI/TII mengepung kampung Cipari, dari peristiwa itu sebanyak 30 laskar Darussalam tertangkap dan harus menyatakan setia atau dibunuh, setelah mereka menyatakan kesetiaannya kepada DI, mereka dilepas, namun pernyataan itu hanyalah sekedar taktik dari pasukan Darussalam untuk bisa lepas dari Darul Islam.

Kelima, perbedaan lain dari SM Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Tauljiri menyangkut dengan perspektif mengenai pendirian Negara Islam, hal ini merupakan salah satu sumber konflik di antara pemimpin-pemimpin Islam pada masa revolusi. Pandangan S.M Kartosuwiryo tentang Negara Islam didasarkan pada proses mula terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW di awal abad pertama Hijriah. Sedangkan pandangan K.H Yusuf Tauljiri menghendaki Masyarakat Islam (*Islamic Society*) dengan kata lain mengislamkan masyarakatnya, bukan mengislamkan negaranya (mendirikan Negara Islam).

Keenam, perbedaan lain dari S.M. Kartosuwiryo dengan K.H Yusuf Tauljiri menyangkut dengan sikap politik yang diambil mengenai hasil perjanjian Renville antar RI dengan Belanda. Sikap politik K.H Yusuf Tauljiri dalam menyikapi hasil dari perjanjian Renville, secara pribadi beliau menyayangkan hasil perjanjian tersebut. Namun, meskipun begitu beliau menyikapinya dengan jiwa patriotisme

tinggi. Dalam hal ini laskar Darussalam oleh K.H Yusuf Tadjiri dibagi menjadi dua pasukan, yakni sebagian diikutsertakan untuk melakukan Hijrah, sebagian pasukan lagi yang dipimpin langsung oleh K.H Yusuf Tadjiri mengangkat senjata melawan Belanda mempertahankan Jawa Barat. Sedangkan peristiwa penarikan mundur militer tentara Divisi Siliwangi oleh RI ke Jawa Tengah, ditambah dengan pendirian Negara Pasundan oleh Belanda, dipandang oleh Kartosuwiryo sebagai momen yang tepat untuk mewujudkan ambisinya yaitu mendirikan Darul Islam.

Ketujuh, pertentangan/perbedaan pandangan politik, maupun itu politik praktis antara pimpinan DI dengan pimpinan pasukan Darussalam, berujung kepada suatu konflik fisik yang tak kurang dari 46 kali pihak DI/TII menyerang pihak Darussalam. Pasukan Darussalam yang berbasis di Pesantren Cipari menjadi target utama serangan DI selama periode 1949-1958. Penyerangan pertama terjadi pada tanggal 30 Januari 1949, Serangan yang terbesar terjadi pada tanggal 17 April 1952. Sekitar 3000 anggota (TII) melakukan tiga kali serangan kepada Darussalam, yang hanya dipertahankan oleh K.H Yusuf Tadjiri bersama anak buahnya dengan 7 senapan, pistol dan Granat. Serangan terbesar kedua yaitu pada 5 Agustus 1952, sekitar 1500 anggota (TII) mengepung Cipari, dalam pertempuran itu jatuh korban 24 orang meninggal (15 korban mayat gerombolan dan 9 mayat penduduk), 23 luka-luka, rumah yang terbakar ada 58 buah.

Kedelapan, Adapun Penyerangan Darul Islam pada tahun-tahun berikutnya hanya sebatas penyerangan dengan skala kecil, hal ini dikarenakan setelah tahun 1952 kekuatan pasukan Darussalam sudah lebih dari satu pleton dan dipersenjatai oleh pihak militer setempat. Dan menurunnya intensitas penyerangan Darul Islam

terhadap Darussalam, dikarenakan juga semakin intensifnya pertempuran-pertempuran antara DI dengan TNI, yang pada saat itu pihak TNI sedang gencar-gencarnya melakukan penumpasan “pembersihan” terhadap gerakan DI/TII. Akhirnya kondisi Darul Islam pada tahun 1958 sampai tahun 1960-an kekuatannya semakin menurun, bahkan dengan operasi Pagar Betis yang dilancarkan TNI dan masyarakat, pada tahun 1962 pergerakan DI/TII ini musnah, ditandai dengan tertangkapnya S.M. Kartosuwiryo. Setelah berakhirnya gerakan DI/TII, kehidupan Pesantren Darussalam mulai normal kembali dan pendidikan mulai dijalankan kembali

